

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Dimulainya aktifitas pembangunan bentang tengah Jembatan Suramadu ditandai dengan acara *Start Up Ceremony Main Span Project of Suramadu Bridge* yang dilaksanakan pada 19 November 2005, oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, didampingi oleh Duta Besar Republik Rakyat China, Lan Lijun, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, serta dari pihak proyek yaitu A.G Ismail dari Induk Pelaksana Kegiatan Jembatan Suramadu dan dari CCC yang diwakili oleh Wang Jian. Dalam kesempatan itu Duta Besar China menegaskan bahwa Jembatan Suramadu adalah simbol persahabatan hubungan antara dua negara yaitu China dan Indonesia, sehingga pihaknya sangat mendukung agar jembatan ini dapat selesai tepat waktu yaitu pada tahun 2008.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPUPLN (Badan Pimanan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, dua

perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Pembangunan Jembatan Tol Suramadu diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), yang secara struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk lebih mendukung peningkatan kinerja BPWS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaksud didalam peraturan perundangan tersebut.

2.1.1 Visi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Terwujudnya Wilayah Suramadu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Simpul Transportasi Nasional Dengan Mempertahankan Nilai Budaya Masyarakat.

2.1.2 Misi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Suramadu melalui program fasilitasi sektor dan stimulasi oleh BPWS melalui koordinasi dengan unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
- b. Mempercepat pembangunan, pengelolaan dan pengusahaan Jalan Tol Lingkar Timur Surabaya serta Kawasan Suramadu, Jembatan Suramadu, Jalan Akses Suramadu menuju Pelabuhan Peti Kemas dan Pelabuhan Peti Kemas (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, Surabaya dan Kawasan Khusus di Pulau Madura) melalui Koordinasi dengan Unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
- c. Meningkatkan profesionalisme manajemen internal.
- d. Mengintegrasikan kawasan pertumbuhan di Pulau Jawa sinergi dengan pengembangan wilayah Surabaya – Madura.
- e. Mengintergrasikan pengembangan sistem perkotaan Pulau Madura dengan sistem perkotaan di Pulau Jawa.
- f. Mengintegrasikan sistem kegiatan ekonomi dan transportasi internal wilayah Surabaya - Madura dengan wilayah sekitarnya.
- g. Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

2.2 Wilayah Usaha Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Wilayah usaha Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura dibagi menjadi 2 daerah wilayah kerja yang menangani pembangunan dan fasilitasi Madura.

1. Penugasan A (Seluruh Madura)
2. Penugasan B (Kawasan dan Infrastruktur Inti)



Gambar 2.1 Skema Penugasan A

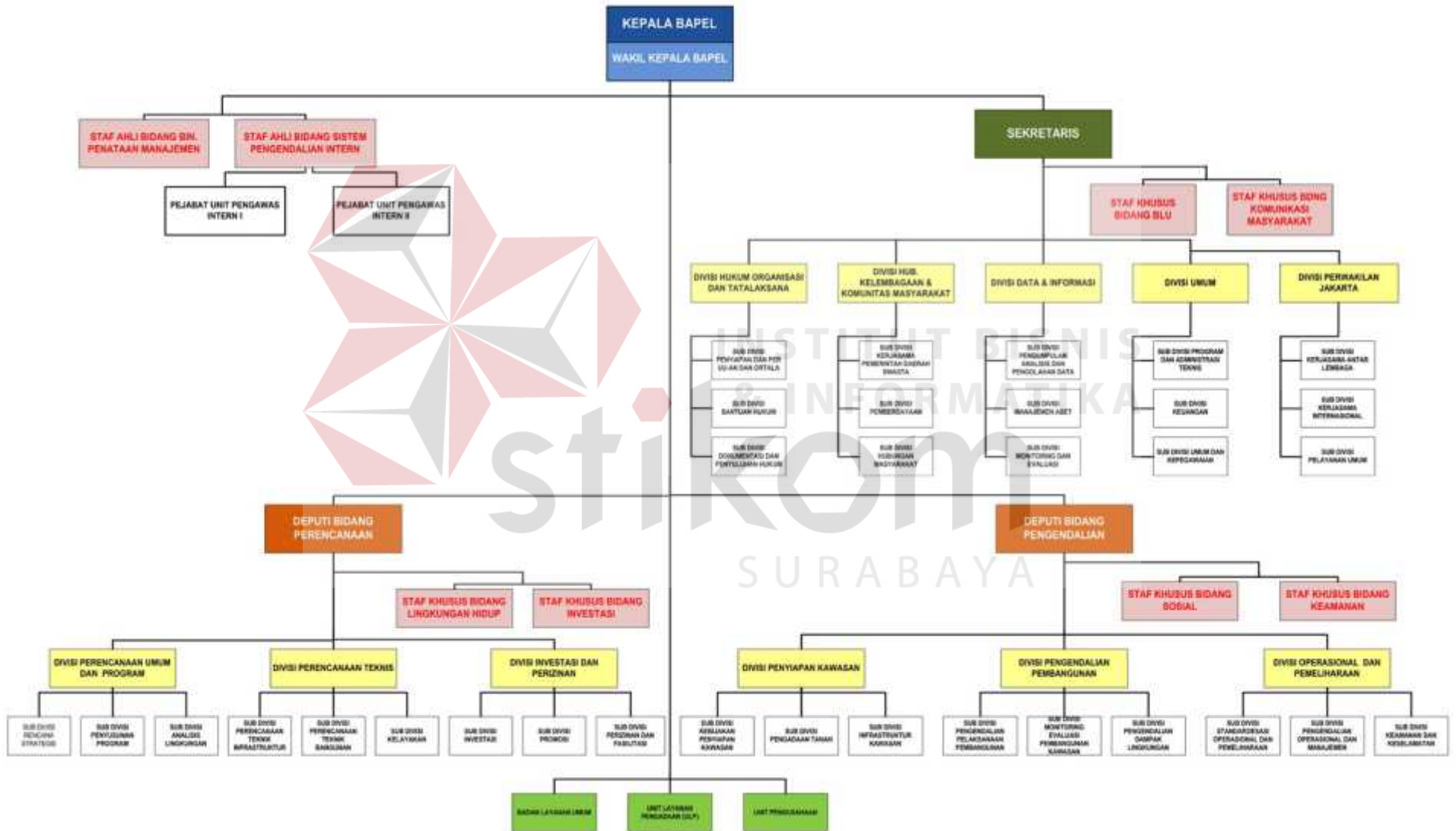


Gambar 2.2 Skema Penugasan B

2.3 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA**

Lampiran : Peraturan Kepala BP BPWS
Nomor : 01/PER/BP-BPWS/01/2011



Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPWS

